

TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DAERAH DALAM PEMUTASIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS

Ahmad Zein Rizal Ridwan

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Manajemen pegawai negeri sipil merupakan upaya untuk meningkatkan efisien, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai negeri sipil. salah satu bentuk manajemen terhadap pegawai negeri sipil adalah mutasi. Mutasi mempunyai tujuan utama yaitu untuk menghindari konflik kepentingan dan mutasi dilakukan untuk pengembangan karier pegawai itu sendiri. Secara khusus, pegawai negeri sipil yang menangani urusan administrasi kependudukan harus melalui izin menteri dalam negeri baru dapat dilakukan mutasi. Karena hal ini terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten kudus, bahwa ada seorang pegawai negeri sipil yang menangani urusan administrasi kependudukan dimutasi tanpa melalui izin dari menteri dalam negeri dan yang memproses pemutasian pegawai negeri sipil adalah sekretaris daerah sebagai pejabat yang berwenang. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui pertanggung jawaban sekretaris daerah sebagai pejabat yang berwenang. Dengan menggunakan yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah sekretaris daerah dapat dimintai tanggung jawab sebagai pejabat yang berwenang dalam pemutasian tersebut. Hasil penelitian bahwa sekretaris daerah dapat dimintai pertanggung jawaban atas pemutasian tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera serta dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: *manajemen, pegawai negeri sipil, mutasi, sekretaris daerah, tanggung jawab.*

RESPONSIBILITY OF THE REGIONAL SECRETARY IN THE RESTORATION OF CIVIL SERVANTS OF THE CIVIL SERVICE OF THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OF KUDUS DISTRICT

Ahmad Zein Rizal Ridwan

Law/Legal Studies

Advisors:

1. Sriwati, S.H., C.N., M.Hum.
2. Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRACT

The management of civil servants is an effort to improve the efficiency, effectiveness and degree of professionalism of the implementation of duties, functions and obligations of civil servants. one form of management of civil servants is mutation. Mutations have the main purpose of avoiding conflicts of interest and mutations are carried out for the career development of the employee himself. In particular, civil servants who handle the affairs of the population administration must go through the permission of the new interior minister can be carried out mutations. Because this is the case in the environment of the holy district government, that there is a civil servant who handles the affairs of the administrative population mutated without the permission of the interior minister and who processes the restoration of civil servants is the regional secretary as the authorized official. Therefore, research needs to be conducted to find out the responsibility of the regional secretary as an authorized official. Using normative juridical use, the study is intended to analyze whether the regional secretary can be held accountable as an authorized officer in the mutation of the seized. The results of the study that the regional secretary can be held accountable for such agitation under Law No. 5 of 2014 on Civil Apparatus of the Country and may be subject to administrative sanctions in accordance with Government Regulation No. 53 of 2010 on Discipline of Civil Servants.

Keywords: *civil servants, mutations, regional secretaries, responsibilities*